



KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KPKNL SORONG



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIC INDONESIA

LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2023

AUDITED

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Sorong

Gedung Keuangan Negara (GKN) Sorong, Jalan Basuki Rahmat KM.7 Sorong 98416

Telepon (0951) 324868 Faksimile (0951) 327509 situs www.djkn.kemenkeu.go.id

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

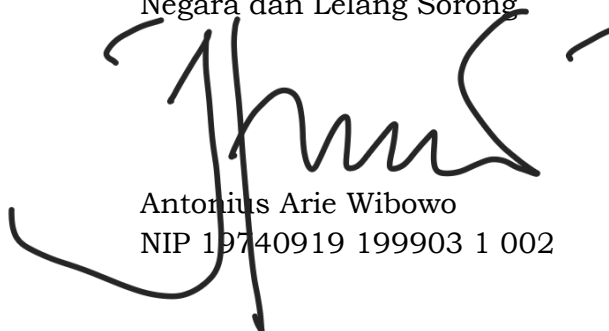
Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Sorong adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2023 Audited Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Sorong mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Sorong. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Sorong, 13 Mei 2024

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan
Negara dan Lelang Sorong



Antonius Arie Wibowo
NIP 19740919 199903 1 002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	IV
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca	4
III. Laporan Operasional	5
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	6
V. Catatan atas Laporan Keuangan	7
A. Penjelasan Umum	7
B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	19
C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	25
D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	37
E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	43
F. Pengungkapan- Pengungkapan Lainnya	45
VI. Lampiran dan Daftar	

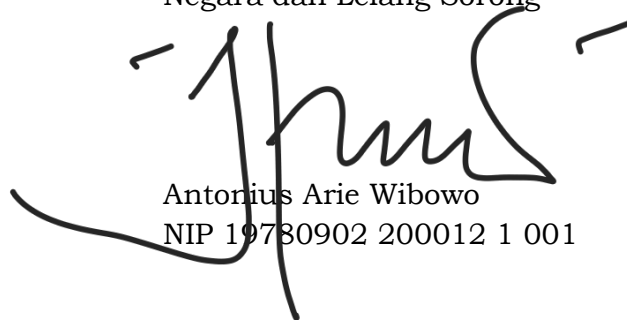
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SORONG
GEDUNG KEUANGAN NEGARA SORONG,
JL. BASUKI RAHMAT KM. 7 KOTA SORONG
TELEPON (0951) 324868

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Tahun 2023 Audited Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Sorong yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Triwulan IV Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Sorong, 13 Mei 2024
Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan
Negara dan Lelang Sorong



Antonius Arie Wibowo
NIP 19730902 200012 1 001

Laporan Keuangan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Sorong Tahun 2023 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023.

Realisasi Pendapatan Negara pada selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp3.650.046.313,- atau mencapai 116% dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp3.147.785.000,-

Realisasi Belanja Negara pada selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp1.609.766.628,- atau mencapai 91% dari alokasi anggaran sebesar Rp1.778.333.000,- .

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2023. Nilai Aset disajikan sebesar Rp13.024.507.551,- yang terdiri dari: Aset Lancar (neto) sebesar Rp15.068.490,- ; Aset Tetap (neto) sebesar Rp13.009,439.061,- . Nilai Kewajiban sebesar Rp3.375.156,- dan nilai Ekuitas sebesar Rp13.021.132.395,- .

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan operasional, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan operasional untuk periode sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp3.595.153.313,- , sedangkan jumlah beban kegiatan operasional adalah sebesar Rp1.837.393.863,- sehingga terdapat Surplus dari Kegiatan Operasional senilai Rp1.757.759.450,- . Kegiatan Non Operasional sebesar Rp54.893.000,-, dan Pos Luar Biasa sebesar Rp0 sehingga entitas mengalami Surplus-LO sebesar Rp1.812.652.450,-.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas awal pada tanggal 01 Januari 2023 adalah sebesar Rp13.076.656.759,- ditambah Surplus-LO sebesar Rp1.812.652.450,- dikurangi Transaksi Antar Entitas sebesar Rp1.868.176.814,- sehingga Ekuitas Akhir entitas pada tanggal 31 Desember 2023 adalah senilai Rp13.021.132.395,- .

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2023 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN**KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SORONG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN
31 DESEMBER 2022***(Dalam Rupiah)*

Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	3,147,785,000	3,650,046,313	115.96	3,662,733,737
JUMLAH PENDAPATAN		3,147,785,000	3,650,046,313	115.96	3,662,733,737
BELANJA	B.2				
Belanja Pegawai	B.3	-	-	0.00	-
Belanja Barang	B.4	1,642,942,000	1,476,277,155	89.86	1,007,436,237
Belanja Modal	B.5	135,391,000	133,489,473	98.60	0
Belanja Bantuan Sosial	B.6	-	-	0.00	-
JUMLAH BELANJA		1,778,333,000	1,609,766,628	90.52	1,007,436,237

Catatan atas Laporan Keuangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SORONG
NERACA
PER 31 DESEMBER 2023 DAN
31 DESEMBER 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2023	TA 2022
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	-	-
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	671,274	74,228,063
Piutang Bukan Pajak	C.4	-	-
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.5	-	-
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.6	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar	C.7	-	-
Belanja Dibayar di Muka	C.8	-	-
Pendapatan yang Masih harus Diterima	C.9	-	-
Persediaan	C.10	14,397,216	11,815,033
Jumlah Aset Lancar		15,068,490	86,043,096
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.11	-	-
Piutang Tagihan Penjualan Angsuran	C.12	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	C.13	-	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang		-	-
ASET TETAP			
Tanah	C.14	8,801,994,000	8,801,994,000
Peralatan dan Mesin	C.15	4,547,154,585	4,465,575,692
Gedung dan Bangunan	C.16	4,146,029,000	4,146,029,000
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.17	-	-
Aset Tetap Lainnya	C.18	15,590,690	15,590,690
Konstruksi dalam pengerjaan	C.19	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.20	(4,501,329,214)	(4,364,347,656)
Jumlah Aset Tetap		13,009,439,061	13,064,841,726
ASET LAINNYA			
Aset Tidak Berwujud	C.21	-	-
Aset Lain-Lain	C.22	284,927,677	-
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.23	(284,927,677)	-
Jumlah Aset Lainnya		-	-
JUMLAH ASET		13,024,507,551	13,150,884,822
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Uang Muka dari KPPN	C.24	-	-
Utang kepada Pihak Ketiga	C.25	3,375,156	74,228,063
Pendapatan Diterima di Muka	C.26	-	-
Utang Yang Belum Ditagihkan	C.27	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		3,375,156	74,228,063
JUMLAH KEWAJIBAN		3,375,156	74,228,063
EKUITAS			
Ekuitas	C.28	13,021,132,395	13,076,656,759
JUMLAH EKUITAS		13,021,132,395	13,076,656,759
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		13,024,507,551	13,150,884,822

Catatan atas Laporan Keuangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

IV. LAPORAN OPERASIONAL

**KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SORONG
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN
31 DESEMBER 2022**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2023	TA 2022
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN PERPAJAKAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	3,595,153,313	3,661,733,737
JUMLAH PENDAPATAN		3,595,153,313	3,661,733,737
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	-	-
Beban Persediaan	D.3	65,276,945	74,898,333
Beban Barang dan Jasa	D.4	761,444,350	746,192,990
Beban Pemeliharaan	D.5	242,692,133	248,265,728
Beban Perjalanan Dinas	D.6	407,786,426	220,539,815
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	-	-
Beban Bantuan Sosial	D.8	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	360,194,009	322,954,268
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	-	-
JUMLAH BEBAN		1,837,393,863	1,612,851,134
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		1,757,759,450	2,048,882,603
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.11		
Surplus/(Defisit) Penjualan Aset Nonlancar		48,399,000	1,000,000
Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		6,494,000	(497,178)
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		54,893,000	502,822
SURPLUS/(DEFISIT) SEBELUM POS LUAR BIASA		1,812,652,450	2,049,385,425
POS LUAR BIASA	D.12		
Beban Luar Biasa		-	-
SURPLUS/(DEFISIT) LO		1,812,652,450	2,049,385,425

Catatan atas Laporan Keuangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SORONG
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN
31 DESEMBER 2022***(Dalam Rupiah)*

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022
EKUITAS AWAL	E.1	13,076,656,759	13,198,931,589
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	1,812,652,450	2,049,385,425
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI MENDASAR	E.3		
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.4	-	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.4.1	-	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.4.2	-	-
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.4.3	-	-
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI	E.4.4	-	143,586,918
KOREKSI LAIN-LAIN	E.4.5	-	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	(1,868,176,814)	(2,315,247,173)
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	E.5	(55,524,364)	(122,274,830)
EKUITAS AKHIR	E.6	13,021,132,395	13,076,656,759

Catatan atas Laporan Keuangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Sorong

*Dasar Hukum
Entitas dan
Rencana
Strategis*

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Sorong didirikan didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang mempunyai tugas dan fungsi dalam melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian dan lelang. Melalui peran Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Sorong diharapkan kualitas laporan Kementerian Negara/Lembaga dapat ditingkatkan yang pada akhirnya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dapat disajikan dengan akuntabel, akurat dan transparan.

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Sorong hingga saat ini berlokasi di Gedung Keuangan Negara Sorong, Jl. Basuki Rahmat KM. 7 Kota Sorong, Papua Barat Daya – 98419, bersama-sama dengan Kantor Wilayah DJBC Khusus Papua, Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai Tipe B Sorong, dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Sorong.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat Perpres Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Unit Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia yang telah diperbarui oleh Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/KMK.01/2006 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 466/KMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, telah dibentuk Unit Eselon I Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara mempunyai tugas untuk merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kekayaan negara, piutang negara dan lelang, dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Oleh karena itu, tugas-tugas seperti penyelesaian mengenai usul penghapusan, penetapan status penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, dan pengelolaan barang milik negara, termasuk masalah-masalah yang berhubungan dengan kekayaan negara lainnya, piutang, dan lelang dari Kementerian Negara/Lembaga selanjutnya ditangani oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2023 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Sorong. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Tingkat Instansi (SAKTI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

Sistem Akuntansi Tingkat Instansi (SAKTI) dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Selain itu, Sistem Akuntansi Tingkat Instansi (SAKTI) dirancang untuk menghasilkan Laporan Barang Satuan Kerja yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

*Basis
Akuntansi*

A.3. Basis Akuntansi

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Sorong menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar
Pengukuran*

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Sorong dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan
Akuntansi*

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Triwulan IV Tahun 2023 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Sorong. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Sorong adalah sebagai berikut:

*Pendapatan-
LRA*

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Pendapatan-
LO*

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas

Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	2. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	3. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - Harga pembelian terakhir apabila diperoleh dengan pembelian;
 - Harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - Harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

a. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b) pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah); dan
 - c) pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan zaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

*Penyusutan
Aset Tetap*

b. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a) Tanah;
 - b) Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan
 - c) Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

*Piutang
Jangka
Panjang*

a. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

b. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud (ATB), tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerja sama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- ATB disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2016 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software</i> Komputer.	4
<i>Franchise</i> .	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek
Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau

jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Sorong telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya dana tambahan program sertifikasi SBSK di seksi Pengelolaan Kekayaan Negara dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi. Perubahan tersebut berdasarkan jenis belanja antara lain:

Uraian	31 DESEMBER 2023	
	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi
Belanja		
Belanja Pegawai	-	-
Belanja Barang	1,617,736,000	1,642,942,000
Belanja Modal	135,391,000	135,391,000
Belanja Bantuan Sosial	-	-
Jumlah	1,753,127,000	1,778,333,000

Realisasi
Pendapatan
Rp3.650.046.313,-

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp3.650.046.313,- atau mencapai 115,96% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp3.147.785.000,- . Pendapatan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Sorong adalah Pendapatan Penerimaan Bukan Pajak dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan 31 Desember 2023

	Estimasi	Realisasi	%
Pendapatan Dari Penjualan Peralatan dan Mesin	12,000,000	48,399,000	403.33%
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	9,000,000	-	0%
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	6,000,000	-	0%
Pendapatan Jasa Lainnya	-	202,362	0%
Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I	1,218,000,000	985,944,458	80.95%
Pendapatan Bea Lelang	1,890,000,000	2,581,367,404	136.58%
Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara	12,785,000	1,757,021	13.74%
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang	-	6,494,000	0%
Pendapatan Penyetoran Kelebihan Hasil Bersih Lelang Yang Tidak Diambil	-	14,085,396	0%
Pendapatan Anggaran Lain-lain Negara	-	11,796,672	0%
Jumlah	3,147,785,000	3,650,046,313	115.96%

Realisasi Belanja
Negara
Rp1.609.766.628,-

B.2 Belanja

Realisasi Belanja Triwulan IV sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp1.609.766.628,- atau 90,52% dari anggaran belanja sebesar Rp1.778.333.000,- Rincian anggaran dan realisasi belanja adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja 31 Desember 2023

Uraian	31 Desember 2023		
	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Pegawai	-	-	-
Belanja Barang	1,642,942,000	1,476,277,155	89.86
Belanja Modal	135,391,000	133,489,473	98.60
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Jumlah	1,778,333,000	1,609,766,628	90.52

Realisasi Belanja sampai dengan 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar 25,43% dibandingkan realisasi belanja pada 31 Desember 2022. Hal ini disebabkan oleh adanya belanja modal pada tahun 2023.

Perbandingan Realisasi Belanja 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Naik/ (Turun) %
Belanja Pegawai	-	-	-
Belanja Barang	1,476,277,155	1,283,434,689	15.03
Belanja Modal	133,489,473	-	-
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Jumlah	1,609,766,628	1,283,434,689	25.43

Belanja Pegawai
Rp0

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai sampai dengan 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 2/KN/2020 tanggal 28 Februari 2020 tentang

Sentralisasi Pengelolaan Belanja Pegawai Untuk Pegawai Lingkup Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, pembayaran belanja pegawai dilakukan secara terpusat melalui Kantor Pusat DJKN.

Perbandingan Belanja Pegawai 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

URAIAN	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji Pokok PNS	-	-	0.00
Belanja Pembulatan Gaji PNS	-	-	0.00
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	-	-	0.00
Belanja Tunj. Anak PNS	-	-	0.00
Belanja Tunj. Struktural PNS	-	-	0.00
Belanja Tunj. PPh PNS	-	-	0.00
Belanja Tunj. Beras PNS	-	-	0.00
Belanja Uang Makan PNS	-	-	0.00
Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS	-	-	0.00
Belanja Tunjangan Umum PNS	-	-	0.00
Belanja Lembur	-	-	0.00
Jumlah Belanja Kotor	-	-	0.00
Pengembalian Belanja Pegawai	-	-	0.00
Jumlah Belanja	-	-	0.00

Belanja Barang

Rp1.488.249.655,-

B.4. Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang sampai dengan 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp1.488.249.655,- dan Rp1.283.434.689,- Realisasi Belanja Barang 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar 15,96% dari Realisasi Belanja Barang 31 Desember 2022. Hal ini antara lain disebabkan naiknya belanja barang non operasional, belanja persediaan dan belanja perjalanan dinas pada 31 Desember 2023 dibandingkan dengan 31 Desember 2022. Selain itu, terdapat pengembalian belanja sebesar Rp11.972.500 pada tahun anggaran 2023.

Perbandingan Belanja 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022	Naik/ (Turun) %
Belanja Barang Operasional	665,597,141	672,887,361	(1.08)
Belanja Barang Non Operasional	67,956,527	46,450,000	46.30
Belanja Jasa	25,186,800	26,855,629	(6.21)
Belanja Pemeliharaan	242,692,133	248,265,728	(2.25)
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	407,786,426	220,539,815	84.90
Belanja Barang Persediaan	67,058,128	68,436,156	(2.01)
Jumlah Belanja Kotor	1,476,277,155	1,283,434,689	15.03
Pengembalian Belanja	11,972,500	0	-
Jumlah	1,488,249,655	1,283,434,689	15.96

Belanja Modal

Rp133.489.473,-

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp133.489.473,- dan Rp0. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi Belanja Modal sampai dengan 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar 100% dibandingkan 31 Desember 2022.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal 31 Desember 2023 dan
31 Desember 2022

Uraian	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022	Naik/ (Turun) %
Belanja Modal Tanah	-	-	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	133,489,473.00	0	-
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	-
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-
Belanja Modal Lainnya	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	133,489,473.00	-	-
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah	133,489,473	0	100.00

Belanja Modal

Tanah

Rp0

B.5.1. Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi Belanja Modal Tanah 31 Desember 2023 tidak mengalami kenaikan/penurunan dibandingkan 31 Desember 2022. Hal ini disebabkan karena tidak adanya Belanja Modal Tanah pada TA 2022.

Perbandingan Belanja Modal Tanah 31 Desember 2023 dan
31 Desember 2022

Uraian	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022	Naik/ (Turun) %
Belanja Modal Tanah	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Belanja Modal
Peralatan dan
Mesin
Rp133.489.473,-

B.5.2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp133.489.473,-, mengalami kenaikan sebesar 100% dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin 31 Desember 2022 sebesar Rp0.

Perbandingan Belanja Modal Peralatan dan Mesin 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022	Naik/ (Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	133,489,473.00	-	-
Jumlah Belanja Kotor	133,489,473.00	-	-
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah	133,489,473.00	-	100.00

Belanja Modal
Gedung dan
Bangunan
Rp0

B.5.3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi 31 Desember 2023 tidak mengalami kenaikan/penurunan dibandingkan realisasi tahun anggaran lalu. Hal ini disebabkan tidak adanya Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022.

Perbandingan Belanja Modal Gedung dan Bangunan 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022	Naik/ (Turun) %
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	-	-	-

Belanja Modal
Jalan, Irigasi, dan
Jaringan

B.5.4. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 Realisasi 31 Desember 2023 tidak

Rp0

mengalami kenaikan/penurunan dibandingkan realisasi tahun anggaran lalu.

Perbandingan Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022	Naik/ (Turun) %
Belanja Modal Jaringan, Irigasi, dan Jaringan	0	0	-
Jumlah Belanja Kotor	0	0	-
Pengembalian Belanja	0	0	-
Jumlah Belanja	0	0	-

Belanja Modal

Lainnya

Rp0

B.5.5. Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi Belanja Modal Lainnya 31 Desember 2023 tidak mengalami kenaikan/penurunan dibandingkan 31 Desember 2022.

Perbandingan Belanja Modal Lainnya 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022	Naik/ (Turun) %
Belanja Modal Lainnya	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	-	-	-

Belanja Bantuan

Sosial

Rp0

B.6. Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Belanja Bantuan Sosial merupakan belanja pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Realisasi tersebut pada 31 Desember 2023 tidak mengalami kenaikan/penurunan dibandingkan 31 Desember 2022.

Perbandingan Belanja Bantuan Sosial 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022	Naik/ (Turun) %
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	-	-	-

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Kas di Bendahara
Pengeluaran

Rp0

C.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0,- yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022
Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-
Jumlah	-	-

Kas di Bendahara
Penerimaan
Rp0

C.2. Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Rincian Kas di Bendahara Penerimaan 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	30 SEPTEMBER 2023	30 SEPTEMBER 2022
Kas di Bendahara Penerimaan	-	-
Jumlah	-	-

Kas Lainnya dan
Setara Kas
Rp671.274,-

C.3. Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp671.274,- dan Rp74.228.063,-. Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kelompok akun yang digunakan untuk

mencatat kas dan setara kas yang dikelola oleh Bendahara Umum Negara dan Kementerian Negara/Lembaga. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Adapun rincian Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan pada tanggal pelaporan merupakan Uang Jaminan Lelang yang tidak dapat diidentifikasi, serta tidak terdapat permohonan untuk mengembalikan uang tersebut. Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas adalah sebagai berikut:

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022
-Kas Lainnya dan Setara Kas	671,274	74,228,063
Jumlah	671,274	74,228,063

*Piutang PNBP
Rp0*

C.4. Piutang PNBP

Saldo piutang PNBP per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang PNBP merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang PNBP disajikan sebagai berikut:

Rincian Piutang PNBP 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	30 SEPTEMBER 2023	30 SEPTEMBER 2022
-Piutang PNBP	-	-
Jumlah	-	-

*Bagian Lancar
Tagihan TP/TGR
Rp0*

C.5. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Bagian Lancar TP/TGR merupakan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal pelaporan yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian Bagian Lancar TP/TGR adalah sebagai berikut:

Rincian Bagian Lancar TP/TGR 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Bagian Lancar
TPA
Rp0

Uraian	30 SEPTEMBER 2023	30 SEPTEMBER 2022
-Bagian Lancar TP/TGR	-	-
Jumlah	-	-

C.6. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Bagian Lancar TPA merupakan TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan, dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Bagian Lancar TPA 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	30 SEPTEMBER 2023	30 SEPTEMBER 2022
-Bagian Lancar TPA	-	-
Jumlah	-	-

Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih–Piutang
Lancar
Rp0

C.7. Penyisihan Piutang Tak Tertagih–Piutang Lancar

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih–Piutang Lancar per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyisihan Piutang Tak Tertagih–Piutang Lancar adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang lancar yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur, dengan sebagai berikut:

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih–Piutang Lancar 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Pendek	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang Bukan Pajak			
Lancar		0,50%	-
Kurang Lancar		10%	-
Diragukan		50%	-
Macet		100%	-
Jumlah			-
Bagian Lancar TP/TGR			
Lancar		0,50%	-
Kurang Lancar		10%	-
Diragukan		50%	-
Macet		100%	-
Jumlah			-
Bagian Lancar TPA			
Lancar		0,50%	-
Kurang Lancar		10%	-
Diragukan		50%	-
Macet		100%	-
Jumlah	0		-
Jumlah Piutang Lancar	0	Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	-

Belanja Dibayar
di Muka

C.8. Belanja Dibayar di Muka

Rp0

Saldo Belanja Dibayar di Muka per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Belanja Dibayar di Muka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa yang telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Rincian Belanja Dibayar di Muka adalah sebagai berikut:

Rincian Belanja Dibayar di Muka 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	30 SEPTEMBER 2023	30 SEPTEMBER 2022
Belanja Dibayar di Muka	-	-
Jumlah	-	-

*Pendapatan yang
Masih Harus
Diterima
Rp0,-*

C.9. Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang Masih Harus Diterima per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0,- dan Rp0, merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diserahkan tagihannya kepada penerima jasa, dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022
Pendapatan Masih Harus Diterima	-	-
Jumlah	-	-

*Persediaan
Rp14.397.216,-*

C.10. Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp14.397.216,- dan Rp11.815.033,-. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual dan diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Persediaan 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022
Persediaan	14,397,216	11,815,033
Jumlah	14,397,216	11,815,033

Tagihan TP/TGR

Rp0

C.11. Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya. Rincian Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Tagihan TP/TGR 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Debitur	30 SEPTEMBER 2023	30 SEPTEMBER 2022
-Tagihan TP/TGR	-	-
Jumlah	-	-

Tagihan
Penjualan
Angsuran
Rp0

C.12. Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Tagihan Penjualan Angsuran adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara atas transaksi jual/beli aset tetap instansi. Rincian TPA untuk masing-masing debitur adalah sebagai berikut:

Rincian Tagihan TPA 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Debitur	30 SEPTEMBER 2023	30 SEPTEMBER 2022
-Tagihan Penjualan Angsuran	-	-
Jumlah	-	-

Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih–Piutang
Jangka Panjang
Rp0

C.13. Penyisihan Piutang Tak Tertagih–Piutang Jangka Panjang

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih–Piutang Jangka Panjang per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Penyisihan Piutang Tak Tertagih–Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dan Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang, dengan rincian sebagai berikut:

*Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih–Piutang Jangka Panjang
31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022*

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Panjang	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Tagihan TP/TGR			
Lancar		0,50%	-
Kurang Lancar		10%	-
Diragukan		50%	-
Macet		100%	-
Jumlah	-		-
Tagihan PA			
Lancar		0,50%	-
Kurang Lancar		10%	-
Diragukan		50%	-
Macet		100%	-
Jumlah	-		-
Jumlah Piutang Jangka Panjang	-	Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	-

Tanah

Rp8.801.994.000,-

C.14. Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah di lingkup Kantor Wilayah DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp8.801.994.000,- dan Rp8.801.994.000,- .

Mutasi Aset Tetap Tanah adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 DESEMBER 2023	-
Mutasi tambah:	
-	-
Mutasi kurang:	
-	-
Saldo per 31 Desember 2022	-

Rincian saldo Tanah per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Tanah

Luas	Lokasi	Nilai
1.784 m2	Jl Jenderal Sudirman No.8, Kota Sorong	8.801.994.000
Jumlah		8.801.994.000

Peralatan dan

Mesin

Rp4.547.154.585,-

C.15. Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp4.547.154.585,- dan Rp4.465.575.692,- . Rincian mutasi aset tetap sampai 31 Desember 2023 yaitu terdapat penambahan aset tetap dari Belanja Modal sebesar Rp 133.489.473,- dan Transfer Masuk sebesar Rp108.264.200,- yang terdiri dari Transfer Masuk dari Kantor Pusat DJKN Rp80.678.000,- sesuai BAST-106/KN.1/2023 dan Transfer Masuk dari Kantor Wilayah DJKN Papua, Papua Barat dan Maluku sebesar Rp27.586.200,- sesuai BA-22/WKN.17/2023. Selain itu,

etrdapat pengurangan aset karena penghentian penggunaan sebesar Rp284.927.677,-.

Gedung dan
Bangunan
Rp4.146.029.000,-

C.16. Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 adalah Rp4.146.029.000,- . Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2023	4,146,029,000
Mutasi tambah:	
Reklasifikasi Masuk	-
Mutasi kurang:	
- Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset	-
- Koreksi Semu Hasil Penilaian Kembali	-
Saldo per 31 Desember 2023	4,146,029,000

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Jalan, Irigasi,
dan Jaringan
Rp0

C.17. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi, dan Jaringan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2023	-
Mutasi tambah:	
-	-
Mutasi kurang:	
- Reklasifikasi Keluar	-
Saldo per 31 Desember 2023	-

Rincian aset tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Aset Tetap Lainnya
Rp15.590.690,-

C.18. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, serta jalan, irigasi, dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp15.590.690,- dan Rp15.590.690,- . Aset Tetap tersebut berupa bahan perpustakaan tercetak. Mutasi transaksi terhadap Aset Tetap Lainnya per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2023	15,590,690
Mutasi tambah:	
-	-
Mutasi kurang:	
-	-
Saldo per 31 Desember 2023	15,590,690
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	-
Nilai Buku per 31 Desember 2023	15,590,690

Rincian aset tetap lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Konstruksi Dalam Pengerjaan
Rp0

C.19. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Tidak terdapat Konstruksi Dalam Pengerjaan per tanggal pelaporan.

Aset	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022
-Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-
Jumlah	-	-

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
Rp4.501.329.214,-

C.20. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 adalah Rp4.501.329.214,-. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	4,422,023,688	(3,936,702,575)	485,321,113
2	Gedung dan Bangunan	4,146,029,000	(564,626,639)	3,581,402,361
3	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-	-
4	Aset Tetap Lainnya	15,590,690	-	15,590,690
	Jumlah	8,583,643,378	(4,501,329,214)	4,082,314,164

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Aset Tak Berwujud
Rp0

C.21. Aset Tak Berwujud

Nilai perolehan Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp0 dan Rp0. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik.

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Sorong tidak memiliki Aset Tak Berwujud. Mutasi transaksi terhadap Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2023	-
Mutasi tambah:	
-	-
Mutasi kurang:	
-	-
Saldo per 31 Desember 2023	-
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	-
Nilai Buku per 31 Desember 2023	-

Tidak ada transaksi penambahan atau pengurangan per 31 DESEMBER 2023, dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Aset Tak Berwujud

Uraian	Nilai Perolehan
-Aset Tak Berwujud	-
Jumlah	-

Aset Lain-lain
Rp0

C.22. Aset Lain-lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp0 dan Rp0. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2023	-
Mutasi tambah:	
- Koreksi	-
Mutasi kurang:	
- Koreksi	-
Saldo per 31 Desember 2023	-

Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan, dan nilai buku tersaji pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Akumulasi
Penyusutan dan
Amortisasi Aset
Lainnya
Rp0

C.23. Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Aset Tetap Lainnya	15,590,690	-	15,590,690
	Jumlah	15,590,690	-	15,590,690

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

Uang Muka dari
KPPN
Rp0,-

C.24. Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,- . Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Utang kepada
Pihak Ketiga
Rp3.375.156,-

C.25. Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp3.375.156,- dan Rp74.228.063,- . Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Adapun rinciannya yaitu Kas di Bendahara Penerimaan sejumlah Rp671.274,- yang berasal dari Uang Jaminan Lelang yang Belum Diambil/Diperhitungkan dan Belanja yang Masih Harus Dibayar sejumlah Rp2.703.882,- . Adapun rincian Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2023 sebagaimana terlampir dalam Laporan Posisi Saldo Kas Bendahara Penerimaan KPKNL Sorong per 31 Desember 2023 yaitu Uang Jaminan Lelang yang belum diperhitungkan. Rincian Utang kepada Pihak Ketiga Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Sorong per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2023

Uraian	Jumlah	Penjelasan
Belanja Pegawai Yang Masih Harus Dibayar	-	-
Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar	2,703,882	BYMHD
Utang Kepada Pihak Ketiga	671,274	UJL
Total	-	-

Pendapatan

Diterima di Muka
Rp0

C.26. Pendapatan Diterima di Muka

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah diterima pembayarannya, namun barang/jasa belum diserahkan. Rincian Pendapatan Diterima di Muka dari pihak ketiga disajikan sebagai berikut:

Rincian Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2023

Uraian	Jumlah
Pendapatan Diterima di Muka	-
Total	-

Beban yang

Masih Harus
Dibayar
Rp0

C.27. Beban yang Masih Harus Dibayar

Beban yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp0 dan Rp0, merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima +tagihannya, dengan rincian sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Beban yang Masih Harus Dibayar

Uraian	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022
Beban yang Masih Harus Dibayar	-	-
Jumlah	-	-

Ekuitas

Rp13.021.132.395,-

C.28. Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp13.021.132.395,- dan Rp13.076.656.759,-. Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Penjelasan lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Uraian	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022	Perubahan Ekuitas (Kenaikan/Penurunan)
Ekuitas	13,021,132,395	13,076,656,759	- 55,524,364
Jumlah	13,021,132,395	13,076,656,759	- 55,524,364

Pendapatan PNBP **D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL**

Rp3.650.046.263,- **D.1. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak**

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp1.890.005.454,- dan Rp2.340.315.243,- . Pendapatan tersebut menurun sebesar 0,35% dari tahun sebelumnya, dengan rincian sebagai berikut:

*Rincian Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak 31 Desember 2023 dan
31 Desember 2022*

Uraian	Realisasi 31 Desember 2023	Realisasi 31 Desember 2022	Naik/ (Turun) %
Pendapatan dari Penjualan dan Pengelolaan BMN	48,399,000	1,000,000	4739.90
Pendapatan Jasa Lainnya	202,362	-	100.00
Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening dan Pengelolaan Keuangan	3,569,068,833	3,661,733,737	(2.53)
Pendapatan Denda	-	-	-
Pendapatan Lain-lain	32,376,068	-	100.00
Jumlah	3,650,046,263	3,662,733,737	(0.35)

Pendapatan dari penjualan, pengelolaan BMN, iuran badan usaha berasal dari pendapatan dari penjualan peralatan dan mesin serta pendapatan dari pemindahtanganan BMN lainnya, sementara pendapatan bunga, pengelolaan rekening perbankan dan keuangan berasal dari pendapatan bea lelang oleh Pejabat Lelang Kelas I sebesar Rp1.863.921.024,-, pendapatan jasa lainnya sebesar Rp202.362,- sedangkan

pendapatan lain-lain berasal dari Penyetoran Dana Mengendap pada Kelebihan di Rekening Penampungan Lelang sejumlah Rp11.796.670 yang berasal dari kelebihan transaksi pelunasan lelang yang terakumulasi dari tahun sebelumnya, tetapi belum ada permohonan pengembalian dari pemenang lelang/penyetor, Hasil Bersih Lelang Barang Sitaan dari Dirjen Bea Cukai/Kejaksaan/Kepolisian/Instansi Pemerintah Lainnya sejumlah Rp14.085.396 yang berasal dari hasil penjualan barang sitaan (berupa cek) yang sudah diserahkan ke penjual (Polres Raja Ampat), tetapi belum dicairkan sampai sekarang karena dengan alasan menjadi objek barang bukti di persidangan per 31 Desember 2023. Atas Dana Mengendap tersebut telah dilakukan penyetoran ke kas negara sebagaimana tercantum dalam ND-247/KNL.1703/2023 perihal Laporan Hasil identifikasi, verifikasi, konfirmasi, dan penyelesaian atas saldo dana mengendap pada Rekening Penampungan Bendahara. Selain itu, terdapat pengembalian belanja honor operasional sebesar Rp6.494.000 pada bulan November Tahun 2023.

Beban Pegawai

D.2. Beban Pegawai

Rp0

Jumlah Beban Pegawai pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

URAIAN	30 SEPTEMBER 2023	30 SEPTEMBER 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji Pokok PNS	-	-	0,00
Belanja Pembulatan Gaji PNS	-	-	0,00
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	-	-	0,00
Belanja Tunj. Anak PNS	-	-	0,00
Belanja Tunj. Struktural PNS	-	-	0,00
Belanja Tunj. PPh PNS	-	-	0,00
Belanja Tunj. Beras PNS	-	-	0,00
Belanja Uang Makan PNS	-	-	0,00
Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS	-	-	0,00
Belanja Tunjangan Umum PNS	-	-	0,00
Belanja Lembur	-	-	0,00
Jumlah Belanja Kotor	-	-	0,00
Pengembalian Belanja Pegawai	-	-	0,00
Jumlah Belanja	-	-	0,00

Beban Persediaan

Rp65.276.945,-

D.3. Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp65.276.945,- dan Rp56.445.323,- . Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan, dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022	Naik/ (Turun) %
Beban Persediaan Konsumsi	65,276,945	56,445,323	15.65
Beban Persediaan Lainnya	-	-	-
Jumlah	65,276,945	56,445,323	15.65

Beban Barang

dan Jasa

Rp764.148.232,-

D.4. Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp764.148.232,- dan Rp605.197.316,- . Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Kenaikan Beban Barang dan Jasa terjadi karena adanya peningkatan pada Beban Keperluan Perkantoran, Beban Pengiriman Surat Dinas Satuan Kerja, Beban Bahan,

Beban Langganan Telepon, dan Beban Jasa Profesi, dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Beban Barang dan Jasa 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Beban Keperluan Perkantoran	431,528,075	317,554,001	35.89
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	21,250,744	-	0.00
Beban Pengiriman Surat Dinas Satuan Kerja	20,703,620	15,489,000	33.67
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi Covid-19	8,002,902	38,950,650	(79.45)
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	133,115,500	96,320,000	38.20
Beban Barang Operasional Lainnya	52,028,300	54,175,600	(3.96)
Beban Bahan	52,206,527	19,379,000	169.40
Beban Honor Output Kegiatan	15,750,000	15,750,000	0.00
Beban Barang Non Operasional Lainnya	-	-	0.00
Beban Langganan Telepon	21,958,682	15,341,065	43.14
Beban Sewa	-	-	0.00
Beban Jasa Profesi	4,900,000	-	0.00
Beban Jasa Penanganan Pandemi Covid-19	-	6,375,000	(100.00)
Beban Belanja yang Masih Harus Dibayar	2,703,882	25,863,000	(89.55)
Jumlah	764,148,232	605,197,316	26.26

Beban

Pemeliharaan

Rp242.692.493,-

D.5. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp242.692.493,- dan Rp228.481.925,- . Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Penurunan beban pemeliharaan karena adanya penurunan beban pemeliharaan gedung dan bangunan dibandingkan tahun sebelumnya, dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022	Naik/ (Turun) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	88,448,652	102,273,100	(13.52)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	154,243,841	126,208,825	22.21
Jumlah	242,692,493	228,481,925	6.22

Beban Perjalanan

Dinas

Rp407.786.426,-

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp407.786.426,- dan Rp164.404.840,- . Beban perjalanan dinas merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan.

Kenaikan beban perjalanan dinas disebabkan oleh peningkatan beban perjalanan biasa dan beban perjalanan dinas dalam kota. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

URAIAN JENIS BEBAN	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	368,442,426	146,626,840	151.28
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	39,344,000	17,778,000	121.31
Pengembalian Beban Perjalanan Biasa	-	-	
Jumlah	407,786,426	164,404,840	148.04

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Rp0

D.7. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas. Dalam hal ini, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Sorong untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai akuntansi berbasis akrual yang sudah mulai diterapkan pada tahun 2015. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

URAIAN JENIS BEBAN	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	-	-	0.00
Jumlah	-	-	0.00

Beban Bantuan Sosial Rp0

D.8. Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing Rp0 dan Rp0. Beban Bantuan Sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Tidak

ada kenaikan atau penurunan per 31 Desember 2023. Rincian Beban Bantuan Sosial untuk 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Bantuan Sosial 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

URAIAN JENIS BEBAN	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Bantuan Sosial	-	-	0.00
Jumlah	-	-	0.00

Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp360.194.009,-

D.9. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp360.194.009,- dan Rp188.081.928,-. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan, sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak Berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	270,339,141	117,982,853	129.13
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	89,854,868	42,065,025	113.61
Beban Penyusutan Irigasi	-	25,971,550	(100.00)
Beban Penyusutan Jaringan	-	2,062,500	(100.00)
Beban Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	-	-	0.00
Jumlah Penyusutan	360,194,009	188,081,928	91.51
-	-	-	0.00
Jumlah Amortisasi	-	-	0.00

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Rp0

D.10. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

URAIAN BEBAN PENYISIHAN PIUTANG TAK TERTAGIH	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar	-	-	0.00
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Nonlancar	-	-	0.00
Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	-	-	0.00

Surplus dari Kegiatan Non Operasional Rp54.893.000

D.11. Surplus dari Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

URAIAN	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022	NAIK (TURUN) %
-Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	54,893,000	502,822	#####
Jumlah Pos Luar Biasa	54,893,000	502,822	#####

Pos Luar Biasa Rp0

D.12. Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan, dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa untuk 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Pos Luar Biasa 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

URAIAN	30 SEPTEMBER 2023	30 SEPTEMBER 2022	NAIK (TURUN) %
-Pos Luar Biasa	-	-	0,00
Jumlah Pos Luar Biasa	-	-	0,00

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal
Rp13.076.656.759

E.1. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas awal pada tanggal 1 Januari 2023 dan 1 Januari 2022 adalah masing-masing sebesar Rp13.076.656.759,- dan Rp13.198.931.589,- .

Rincian Ekuitas Awal 1 Januari 2023 dan 1 Januari 2022

URAIAN	1 JANUARI 2023	1 JANUARI 2022	NAIK (TURUN) %
-Ekuitas Awal	13,076,656,759	13,198,931,589	(0.93)
Jumlah Ekuitas Awal	13,076,656,759	13,198,931,589	(0.93)

Surplus LO
Rp1.812.652.450,-

E.2. Surplus/(Defisit) LO

Jumlah Surplus/Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp1.812.652.450,- dan Rp2.049.385.425,- . Surplus/Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, sampai dengan pos luar biasa.

Rincian Surplus/(Defisit) LO 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

URAIAN	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022	NAIK (TURUN) %
-Surplus/Defisit LO	1,812,652,450	2,049,385,425	(11.55)
Jumlah Surplus/Defisit LO	1,812,652,450	2,049,385,425	(11.55)

Dampak Kumulatif
Perubahan Kebijakan
Akuntansi/
Kesalahan Mendasar
Rp0

E.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi /Kesalahan Mendasar pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Rincian Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi /Kesalahan Mendasar per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar	Nilai
-	-
Jumlah	-

Penyesuaian Nilai
Aset
Rp0

E.4.1. Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

Rincian Penyesuaian Nilai Aset per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Koreksi Nilai
Persediaan
Rp0

URAIAN	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022	NAIK (TURUN) %
-Penyesuaian Nilai Aset	-	-	0.00
Jumlah Penyesuaian Nilai Aset	-	-	0.00

E.4.2. Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp0 dan Rp0, dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Koreksi Nilai Persediaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

URAIAN	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022	NAIK (TURUN) %
-Koreksi Nilai Persediaan	-	-	0.00
Jumlah Koreksi Nilai Persediaan	-	-	0.00

Selisih Revaluasi
Aset Tetap
Rp0

E.4.3. Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Rincian Selisih Revaluasi Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

URAIAN	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022	NAIK (TURUN) %
-Selisih Revaluasi Aset Tetap	-	-	0.00
Jumlah Selisih Revaluasi Aset Tetap	-	-	0.00

Koreksi Aset Tetap
Non Revaluasi
Rp0

E.4.4. Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

URAIAN	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022	NAIK (TURUN) %
-Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi	-	-	0.00
Jumlah Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi	-	-	0.00

Koreksi Lain-lain

E.4.5. Koreksi Lain-lain

Rp0

Koreksi Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang, dan utang. Koreksi lain-lain terdiri dari:

Rincian Koreksi Lain-lain

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi
Koreksi Beban	-
Koreksi Pendapatan	-
Koreksi Piutang	-
Koreksi Kewajiban	-
Koreksi Hibah	-
Jumlah	-

Transaksi Antar

Entitas

(Rp1.868.176.814)

E.5. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar (Rp1.868.176.814),- dan (Rp674.214.733). Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Ditagihkan Ke Entitas Lain	1,609,766,628	1,007,436,237	60%
Diterima Dari Entitas Lain	(3,650,046,313)	(2,340,315,243)	56%
Transfer Keluar	-	-	0%
Transfer Masuk	172,102,871	35,651,875	383%
Jumlah	(1,868,176,814)	(1,297,227,131)	44%

Ekuitas Akhir

Rp13.021.132.395,-

E.6. Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas Akhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp13.021.132.395,- dan Rp13.024.774.191,- .

Uraian	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022	Perubahan Ekuitas (Kenaikan/Penurunan)
Ekuitas Akhir	13,021,132,395	13,024,774,191	- 3,641,796
Jumlah	13,021,132,395	13,024,774,191	- 3,641,796

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1. KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Pada Triwulan IV 2023 terdapat mutasi di lingkungan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Sorong, sejumlah 2 Aparatur Sipil Negara yang keluar serta 1 Aparatur Sipil Negara yang masuk.

F.2. PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

Tidak ada penggantian Pejabat Pengelola Keuangan pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Sorong selama periode Triwulan IV Tahun Anggaran 2023. Rinciannya yaitu sebagai berikut:

Satker	Jabatan	Semula	Menjadi
Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Sorong	Kuasa Pengguna Anggaran	Antonius Arie Wibowo	Antonius Arie Wibowo
	Pejabat Pembuat Komitmen	Antonius Arie Wibowo	Antonius Arie Wibowo
	Pejabat Penandatangan SPM	Ade Setiana	Ade Setiana
	Bendahara	Destia Dwi Ramadhan	Destia Dwi Ramadhan

LAMPIRAN DAN DAFTAR

A. Dokumen Pendukung Data Keuangan

1. Dokumen Pendukung Data Keuangan Tahun Anggaran 2023

- (1) Laporan Realisasi Anggaran Belanja Tingkat Satuan Kerja Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2023;
- (2) Laporan Realisasi Anggaran Belanja Dalam Rangka Covid-19 Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2023;
- (3) Laporan Operasional Tingkat Satuan Kerja Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2023;
- (4) Laporan Perubahan Ekuitas Tingkat Satuan Kerja Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2023;
- (5) Laporan Realisasi Anggaran Belanja Menurut Akun Tingkat Satuan Kerja Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2023;
- (6) Laporan Realisasi Anggaran Belanja Menurut Fungsi Tingkat Satuan Kerja Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2023;
- (7) Laporan Realisasi Anggaran Belanja Menurut Organisasi Tingkat Satuan Kerja Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2023;
- (8) Laporan Realisasi Anggaran Belanja Menurut Program Tingkat Satuan Kerja Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2023;
- (9) Laporan Realisasi Anggaran Satuan Kerja Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2023;
- (10) Laporan Realisasi Anggaran Pedapatan Menurut Kelompok Pendapatan/Akun Tingkat Satuan Kerja Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2023;
- (11) Laporan Realisasi Anggaran Pedapatan Menurut Organisasi Tingkat Satuan Kerja Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2023;
- (12) Laporan Realisasi Anggaran Belanja Tingkat Satuan Kerja Menurut Sumber Dana/Jenis Belanja/Akun s.d. Bulan Juni 2023;
- (13) Neraca Percobaan Tingkat Satuan Kerja Per 1 Januari 2023 (Saldo Awal);
- (14) Neraca Percobaan Tingkat Satuan Kerja Per 31 Desember 2023;
- (15) Neraca Percobaan Kas Tingkat Satuan Kerja Per 31 Desember 2023;
- (16) Neraca Tingkat Satuan Kerja Per 31 Desember 2023.

2. Dokumen Pendukung Data Keuangan Tahun Anggaran 2022

- (1) Laporan Realisasi Anggaran Belanja Tingkat Satuan Kerja Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2022;
- (2) Laporan Realisasi Anggaran Belanja Dalam Rangka Covid-19 Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2022;
- (3) Laporan Operasional Tingkat Satuan Kerja Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2022;
- (4) Laporan Perubahan Ekuitas Tingkat Satuan Kerja Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2022;
- (5) Laporan Realisasi Anggaran Belanja Menurut Akun Tingkat Satuan Kerja Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2022;
- (6) Laporan Realisasi Anggaran Belanja Menurut Fungsi Tingkat Satuan Kerja Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2022;
- (7) Laporan Realisasi Anggaran Belanja Menurut Organisasi Tingkat Satuan Kerja Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2022;
- (8) Laporan Realisasi Anggaran Belanja Menurut Program Tingkat Satuan Kerja Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2022;
- (9) Laporan Realisasi Anggaran Satuan Kerja Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2022;
- (10) Laporan Realisasi Anggaran Pedapatan Menurut Kelompok Pendapatan/Akun Tingkat Satuan Kerja Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2022;
- (11) Laporan Realisasi Anggaran Pedapatan Menurut Organisasi Tingkat Satuan Kerja Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2022;
- (12) Laporan Realisasi Anggaran Belanja Tingkat Satuan Kerja Menurut Sumber Dana/Jenis Belanja/Akun s.d. Bulan Juni 2022;
- (13) Neraca Percobaan Tingkat Satuan Kerja Per 1 Januari 2022 (Saldo Awal);
- (14) Neraca Percobaan Tingkat Satuan Kerja Per Juni 2022;
- (15) Neraca Percobaan Kas Tingkat Satuan Kerja Per Juni 2022;
- (16) Neraca Tingkat Satuan Kerja Per Juni 2022.

B. Dokumen Pendukung Data Barang Milik Negara

1. Dokumen Pendukung Data Barang Milik Negara Tahun 2023

- (1) Laporan Posisi Barang Milik Negara di Neraca Per Tanggal 31 Desember 2023;
- (2) Laporan Barang Pengguna Intrakomptabel Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2023;
- (3) Laporan CRBMN Pengguna UAKPB Ekstrakomptabel Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2023;
- (4) Laporan CRBMN Pengguna UAKPB Intrakomptabel Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2023;
- (5) Laporan Barang Kuasa Pengguna Aset Tak Berwujud Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2023;
- (6) Laporan Amortisasi Barang Kuasa Pengguna Aset Tak Berwujud Tahun Anggaran 2023;
- (7) Laporan Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS) Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2023;
- (8) Laporan Barang Pengguna Gabungan Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2023;
- (9) Laporan Barang Hibah DK/TP Yang Telah Diusulkan Proses Hibah Kepada Pengelola Barang Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2023;
- (10) Laporan Barang Hilang Yang Telah Diusulkan Proses Penghapusannya Kepada Pengelola Barang Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2023;
- (11) Laporan Barang Dengan Kondisi Rusak Berat Yang Telah Diusulkan Proses Penghapusannya Kepada Pengelola Barang Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2023;
- (12) Laporan Barang Pengguna Ekstrakomptabel Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2023;
- (13) Laporan Barang Pengguna Intrakomptabel Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2023;
- (14) Laporan Barang Kuasa Pengguna Konstruksi Dalam Pengerjaan Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2023;
- (15) Laporan Posisi Barang Milik Negara Di Neraca Posisi Per Tanggal 01 Januari 202 (Saldo Awal);

- (16) Laporan Posisi Barang Milik Negara Di Neraca Posisi Per Tanggal 31 Desember Tahun Anggaran 2023;
- (17) Laporan Penyusutan Barang Kuasa Pengguna Ekstrakomptabel Triwulan IV Tahun Anggaran 2023;
- (18) Laporan Penyusutan Barang Kuasa Pengguna Intrakomptabel Triwulan IV Tahun Anggaran 2023;
- (19) Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang Bersejarah Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2023;
- (20) Laporan Barang Persediaan Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2023;
- (21) Rincian Realisasi Anggaran Belanja Kapitalisasi Tingkat Satuan Kerja Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2023;
- (22) Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Menurut Pendapatan/Akun Tingkat Satuan Kerja Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2023.

2. Dokumen Pendukung Data Barang Milik Negara Tahun Anggaran 2022

- (1) Laporan Posisi Barang Milik Negara di Neraca Per Tanggal 31 Desember 2022;
- (2) Laporan Barang Pengguna Intrakomptabel Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2022;
- (3) Laporan CRBMN Pengguna UAKPB Ekstrakomptabel Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2022;
- (4) Laporan CRBMN Pengguna UAKPB Intrakomptabel Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2022;
- (5) Laporan Barang Kuasa Pengguna Aset Tak Berwujud Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2022;
- (6) Laporan Amortisasi Barang Kuasa Pengguna Aset Tak Berwujud Triwulan IV Tahun Anggaran 2022;
- (7) Laporan Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS) Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2022;
- (8) Laporan Barang Pengguna Gabungan Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2022;
- (9) Laporan Barang Hibah DK/TP Yang Telah Diusulkan Proses Hibah Kepada Pengelola Barang Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2022;

- (10) Laporan Barang Hilang Yang Telah Diusulkan Proses Penghapusannya Kepada Pengelola Barang Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2022;
- (11) Laporan Barang Dengan Kondisi Rusak Berat Yang Telah Diusulkan Proses Penghapusannya Kepada Pengelola Barang Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2022;
- (12) Laporan Barang Pengguna Ekstrakomptabel Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2022;
- (13) Laporan Barang Pengguna Intrakomptabel Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2022;
- (14) Laporan Barang Kuasa Pengguna Konstruksi Dalam Pengerjaan Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2022;
- (15) Laporan Posisi Barang Milik Negara Di Neraca Posisi Per Tanggal 01 Januari (Saldo Awal) Tahun Anggaran 2022;
- (16) Laporan Posisi Barang Milik Negara Di Neraca Posisi Per Tanggal 31 Desember Tahun Anggaran 2022;
- (17) Laporan Penyusutan Barang Kuasa Pengguna Ekstrakomptabel Triwulan IV Tahun Anggaran 2022;
- (18) Laporan Penyusutan Barang Kuasa Pengguna Intrakomptabel Triwulan IV Tahun Anggaran 2022;
- (19) Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang Bersejarah Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2022;
- (20) Laporan Barang Persediaan Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2022;
- (21) Rincian Realisasi Anggaran Belanja Kapitalisasi Tingkat Satuan Kerja Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2022;
- (22) Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Menurut Pendapatan/Akun Tingkat Satuan Kerja Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2022.



KEMENTERIAN KEUANGAN
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
KPKNL Sorong

DJKN